

Pengembangan Kebijakan: Mendorong Pemerintah Kota Makassar Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Pencegahan Stunting

Irwanyah¹, Iin Ismayanti²

^{1,2}Universitas Indonesia Timur, Jl. Abd. Kadir No.74 Makassar

Corresponding Author: irwanyahfisipoluit@gmail.com

Keyword:
Stunting;
Government policy;
Service Accessibility;
Public service.

Abstract: This research aims to evaluate the effectiveness of stunting prevention policies in Makassar City and identify obstacles that influence implementing these policies. With the prevalence of stunting still high in several sub-districts, this research examines how existing policies reduce the prevalence of stunting and finds factors that hinder the program's success. This research also aims to provide strategic recommendations for improving policies and their implementation. The research method involved qualitative data analysis from primary and secondary sources, including stunting prevalence data from the Makassar City Health Service. This research uses NVivo 12 Plus software to analyze qualitative data. Research findings show that although there has been progress in several aspects of stunting prevention policies, such as nutritious food programs and education campaigns, significant obstacles still hinder their effectiveness. The main obstacles include a lack of regulatory integration, low public awareness, limited resources, and weak coordination between various parties. This research recommends reforms in policy, increased budget allocations, and a more adaptive and community-based educational approach to increase the effectiveness of stunting prevention and significantly reduce the prevalence of stunting in Makassar City.

Kata Kunci:
Stunting;
Kebijakan
Pemerintah;
Aksesibilitas Layanan;
Pelayanan Publik.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dengan prevalensi stunting yang masih tinggi di beberapa kecamatan, penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan yang ada berfungsi dalam mengurangi prevalensi stunting dan menemukan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis data kualitatif dari sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk data prevalensi stunting dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk menganalisis data kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek kebijakan pencegahan stunting, seperti program pemberian makanan bergizi dan kampanye edukasi, masih ada kendala signifikan yang menghambat efektivitasnya. Hambatan utama termasuk kurangnya integrasi regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang lemah antara berbagai pihak. Penelitian ini merekomendasikan reformasi dalam kebijakan, peningkatan alokasi anggaran, serta pendekatan edukasi yang lebih adaptif dan berbasis komunitas untuk meningkatkan efektivitas pencegahan stunting dan mengurangi prevalensi stunting secara signifikan di Kota Makassar.

PENDAHULUAN

Kasus stunting di Kota Makassar masih menjadi perhatian serius, terutama mengingat data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mencatat tingkat stunting sebesar 18,4%. Dinas Kesehatan Kota Makassar pada tahun 2023 menunjukkan prevalensi stunting per kecamatan dengan tingkat tertinggi terdapat di Bontoala (5,98%), Sangkarrang

(5,45%), dan Tamalate (4,40%). Meskipun ada penurunan di beberapa kecamatan seperti Mangala (2,35%) dan Mamajang (0,56%), namun masih terdapat beberapa kecamatan dengan tingkat stunting yang signifikan seperti Bontoala dan Sangkarrang (Lallo, 2023). Pada 2023 juga tercatat 3.333 balita di Kota Makassar alami stunting (Yahya & Utomo, 2013). Dengan demikian, perlu tindakan serius dan terintegrasi dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah stunting di Kota Makassar, termasuk upaya pencegahan dan intervensi yang lebih efektif di tingkat komunitas serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang berkualitas.

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan linier anak yang terjadi akibat kurangnya asupan gizi yang memadai dalam jangka waktu panjang, terutama selama masa pertumbuhan awal (Corrêa et al., 2023; Muhamad et al., 2023; Siswati et al., 2022). Penyebab stunting meliputi faktor gizi yang tidak memadai (T. A. E. Permatasari et al., 2023), infeksi kronis (Yu et al., 2021), akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan (Unmehopa et al., 2023), sanitasi yang buruk (Bagcchi, 2015), dan praktik pemberian makan yang tidak tepat (Astuti et al., 2024). Risiko yang ditimbulkan oleh stunting meliputi penurunan kemampuan kognitif dan motorik (Handryastuti et al., 2022), penurunan daya tahan tubuh terhadap penyakit (Aryastami et al., 2017), serta berpotensi meningkatkan risiko penyakit kronis pada masa dewasa (Atlas et al., 2024), yang pada gilirannya dapat memengaruhi produktivitas dan kualitas hidup individu serta membebani sistem kesehatan secara keseluruhan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan yakni meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting (Huriah et al., 2021).

Stunting merupakan masalah kesehatan serius di Indonesia, dengan prevalensi yang masih tinggi terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan. Faktor utama yang memengaruhi tingginya prevalensi stunting di Indonesia meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, serta kebiasaan pemberian makan yang kurang optimal pada anak balita (Oktaviani et al., 2024; Sumanti, 2024). Selain itu, ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga memperparah permasalahan ini, mengingat masih banyak wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki fasilitas kesehatan yang terbatas. Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program intervensi gizi dan kampanye edukasi tentang kesehatan ibu dan anak dan Kampanye Nasional Gizi Seimbang (Hasan et al., 2023; Oktaviani et al., 2024). Meskipun begitu, diperlukan pendekatan multisektor yang lebih intensif untuk mencapai target penurunan stunting yang berkelanjutan, terutama melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang memadai di seluruh wilayah.

Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting memerlukan respons pemerintah yang terintegrasi dan komprehensif (Brar et al., 2020; Conway et al., 2020; Kandpal et al., 2016). Langkah-langkah tersebut meliputi pembangunan infrastruktur kesehatan yang mencakup pusat kesehatan masyarakat dan posyandu di wilayah yang rentan, serta peningkatan aksesibilitas ke layanan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta program imunisasi (Has et al., 2024). Selain itu, diperlukan juga upaya pendidikan kesehatan yang menyeluruh kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil dan ibu menyusui, tentang pentingnya gizi yang seimbang, dan praktik pemberian makan yang tepat (Aye et al., 2020; Beatty et al., 2024; Goudet et al., 2019; Mutiarasari et al., 2021). Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil juga penting dalam mendukung program-program pencegahan stunting ini, termasuk pengembangan program-program inovatif yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas intervensi (A. Permatasari & Walinegoro, 2023). Dengan demikian, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis ini untuk memastikan bahwa upaya pencegahan stunting dapat mencapai target populasi yang tepat dan menghasilkan dampak yang signifikan dalam menurunkan tingkat stunting di masyarakat.

Urgensi dilakukannya riset ini di Kota Makassar karena di wilayah ini masih sangat rentan, dengan tingkat prevalensi yang mencapai 18,4% pada tahun 2022, ditambah pada 2023 ditemukan 3.333 balita di Kota Makassar alami stunting. Data tersebut menunjukkan bahwa

tindakan cepat dan terintegrasi dari pemerintah Kota Makassar sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting menjadi krusial dalam menanggulangi akar penyebab stunting dan mengurangi risiko yang ditimbulkannya bagi generasi masa depan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah Kota Makassar untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah stunting di tingkat lokal.

Untuk mengatasi tantangan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting di Kota Makassar, pendekatan yang telah dirumuskan meliputi kombinasi strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pertama, Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang telah diterapkan, dengan fokus pada identifikasi keberhasilan dan kelemahan serta pengukuran dampak yang tepat. Selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur kesehatan di berbagai wilayah kota, termasuk pembangunan posyandu dan pusat kesehatan masyarakat yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, kolaborasi dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal menjadi kunci untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan kampanye pendidikan kesehatan yang menyeluruh tentang pentingnya gizi seimbang dan praktik pemberian makan yang tepat kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Terakhir, implementasi sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif membantu dalam memantau kemajuan, mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, serta memastikan keberlanjutan dari upaya pemecahan masalah ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan yang signifikan dalam aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting dan penurunan angka stunting di Kota Makassar.

Meskipun telah ada beberapa upaya sebelumnya dalam mengatasi masalah stunting di Kota Makassar, namun masih minim ditemukan hasil studi yang secara menyeluruh mengkaji aspek kebijakan yang dapat mendorong peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dengan mengeksplorasi secara mendalam efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, mengidentifikasi hambatan-hambatan utama, dan merumuskan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya menangani stunting di Kota Makassar, serta memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan praktik terbaik dalam peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting secara lebih luas.

Rumusan Masalah ini mencakup dua aspek penting dalam upaya meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting di Kota Makassar. Pertama, dengan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar, penelitian ini memberikan gambaran tentang sejauh mana upaya tersebut berhasil dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang relevan di berbagai wilayah kota. Kedua, dengan mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan yang perlu diatasi dalam rangka meningkatkan efektivitas program pencegahan stunting. Implikasi temuan dari penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan terfokus dalam mengatasi masalah stunting, serta mengembangkan strategi yang lebih efisien dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar melalui peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan FGD (Focus Group Discussion). Informan kunci yang

dilibatkan meliputi perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), staf kecamatan dan kelurahan, serta petugas dari posyandu dan puskesmas di Kota Makassar. Informan ini dipilih karena mereka memiliki peran langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program kesehatan masyarakat terkait pencegahan dan penanganan stunting di Kota Makassar. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan dan praktik pencegahan stunting, sementara observasi membantu dalam memperoleh wawasan langsung tentang pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, sedangkan FGD memberikan platform untuk mendiskusikan isu-isu kunci dan menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan.

Menggunakan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan dan praktik pencegahan stunting di Kota Makassar serta memperoleh wawasan yang berharga untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan FGD akan ditranskrip secara rinci untuk kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Pendekatan ini telah umum digunakan dalam menganalisis data kualitatif (Machmud et al., 2020; Utami et al., 2022). Proses analisis akan melibatkan triangulasi data, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasil penelitian. Pendekatan ini akan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dapat diandalkan dan menggambarkan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan praktik pencegahan stunting di Kota Makassar. Hasil penelitian yang telah diolah kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Urgensi Pencegahan Stunting di Kota Makassar

Pencegahan stunting di Kota Makassar sangat mendesak mengingat prevalensi yang masih tinggi, meskipun telah dilakukan berbagai upaya intervensi. Memastikan aksesibilitas terhadap makanan bergizi dan edukasi yang tepat dapat mengurangi dampak negatif stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak di wilayah ini. Berikut adalah tabel yang menggambarkan prevalensi stunting di berbagai kecamatan di Kota Makassar berdasarkan data 2023:

Table.1 Prevalensi stunting di berbagai kecamatan di Kota Makassar 2023

Kecamatan	Prevalensi Stunting (%)
Bontoala	5,98
Sangkarrang	5,45
Tamalate	4,4
Tallo	4,05
Panakkukang	3,5
Rappocini	3,39
Tamalanrea	3,3
Biringkanayya	3,27
Mariso	2,56
Ujung Tanah	2,53
Wajo	2,5
Manggala	2,35
Makassar	1,54
Mamajang	0,56

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2023

Tabel 1 menunjukkan data prevalensi stunting di berbagai kecamatan di Kota Makassar pada tahun 2023. Prevalensi stunting di Kota Makassar bervariasi secara signifikan antar kecamatan, dengan persentase tertinggi tercatat di Kecamatan Bontoala (5,98%) dan terendah di Kecamatan Mamajang (0,56%). Variasi ini menunjukkan adanya perbedaan dalam kondisi gizi dan aksesibilitas layanan kesehatan di masing-masing wilayah. Kecamatan dengan prevalensi tinggi mungkin mengalami kendala dalam aspek gizi dan edukasi yang memerlukan perhatian khusus untuk penanganan stunting. Analisis data menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan dengan prevalensi tinggi, seperti Bontoala, Sangkarrang, dan Tamalate, perlu mendapatkan prioritas dalam upaya pencegahan stunting (Lallo, 2023).

Sebaliknya, kecamatan dengan prevalensi stunting rendah seperti Mamajang dan Makassar mungkin sudah berhasil menerapkan strategi pencegahan yang efektif atau memiliki kondisi sosial-ekonomi yang mendukung. Meski demikian, penting untuk terus memantau dan mempertahankan kualitas intervensi yang telah ada, serta mengevaluasi keberhasilan program-program yang diterapkan di kecamatan-kecamatan tersebut untuk memastikan keberlanjutan perbaikan kesehatan anak. Secara keseluruhan, data ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis wilayah dalam penanganan stunting. Kebijakan dan program yang dirancang untuk mengatasi stunting harus mempertimbangkan kondisi lokal dan menyediakan sumber daya serta dukungan yang sesuai untuk kecamatan dengan prevalensi tinggi. Dengan strategi yang terfokus dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor kesehatan, diharapkan prevalensi stunting dapat ditekan secara efektif di seluruh Kota Makassar.

Urgensi pencegahan stunting di Kota Makassar tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat prevalensi yang masih tinggi di beberapa kecamatan. Dengan prevalensi stunting yang bervariasi secara signifikan, terutama di kawasan dengan angka tertinggi seperti Bontoala dan Sangkarrang, jelas bahwa intervensi yang lebih terfokus dan strategis sangat diperlukan. Peningkatan akses dan distribusi makanan bergizi, bersama dengan edukasi kesehatan yang lebih intensif, harus menjadi prioritas utama untuk menurunkan angka stunting di daerah-daerah dengan prevalensi tinggi. Kegagalan untuk menangani masalah ini secara efektif dapat berdampak pada kualitas hidup anak-anak dan potensi perkembangan masa depan mereka, yang pada gilirannya memengaruhi kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Di sisi lain, kecamatan dengan prevalensi stunting yang rendah menunjukkan bahwa ada praktik dan kebijakan yang mungkin efektif dalam pencegahan stunting. Ini menawarkan kesempatan untuk belajar dari keberhasilan mereka dan menerapkan strategi yang sama di daerah dengan prevalensi tinggi. Namun, penting untuk memastikan bahwa intervensi yang diterapkan tidak hanya mengatasi gejala tetapi juga akar penyebab stunting, seperti akses terbatas ke makanan bergizi dan edukasi yang tidak memadai. Dengan demikian, pencegahan stunting harus menjadi agenda utama dalam perencanaan kebijakan kesehatan di Kota Makassar, untuk memastikan masa depan yang lebih sehat dan produktif bagi seluruh populasi.

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pencegahan Stunting

Evaluasi efektivitas kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar menunjukkan hasil yang beragam, dengan beberapa aspek kebijakan berhasil diimplementasikan sementara yang lain masih memerlukan perbaikan. Secara umum, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar, seperti program pemberian makanan bergizi dan kampanye edukasi, telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi prevalensi stunting. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang konsisten dan dukungan dari berbagai pihak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program pemberian makanan bergizi, termasuk distribusi ikan dan telur, telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan gizi yang baik. Namun, terdapat kendala dalam implementasi, seperti distribusi yang tidak merata dan kurangnya aksesibilitas bagi keluarga yang kurang mampu. Hal ini tercermin dari data prevalensi stunting yang masih tinggi di beberapa kecamatan, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Evaluasi ini mengungkapkan perlunya peningkatan dalam

distribusi dan aksesibilitas makanan bergizi untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat memperoleh manfaat dari program ini.

Kampanye edukasi juga menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan stunting. Meski demikian, ada tantangan terkait dengan perubahan perilaku masyarakat yang tidak terjadi secara instan. Masyarakat masih memiliki persepsi yang berbeda tentang nilai gizi makanan tertentu, seperti ikan, yang dianggap sebagai makanan kelas dua oleh beberapa kelompok. Ini menunjukkan bahwa upaya edukasi perlu lebih ditargetkan dan disesuaikan dengan konteks lokal agar lebih efektif dalam mengubah persepsi dan perilaku masyarakat. Secara keseluruhan, evaluasi efektivitas kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih ada ruang untuk perbaikan. Peningkatan dalam koordinasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi hambatan yang ada dan memastikan bahwa kebijakan pencegahan stunting dapat diterapkan secara lebih efektif. Reformasi dalam kebijakan dan strategi, termasuk perbaikan dalam distribusi makanan bergizi dan pendekatan edukasi yang lebih intensif, akan sangat bermanfaat dalam mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak di Kota Makassar.

Evaluasi efektivitas kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar mengungkapkan beberapa tantangan mendalam yang mempengaruhi hasil dari kebijakan tersebut. Meskipun program pemberian makanan bergizi, seperti distribusi ikan dan telur, telah menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan kesadaran gizi masyarakat, kendala signifikan dalam distribusi yang tidak merata dan aksesibilitas yang terbatas tetap menjadi masalah utama. Terutama di kecamatan dengan prevalensi stunting yang lebih tinggi, program distribusi sering kali tidak mencapai kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti keluarga berpendapatan rendah dan daerah terpencil. Ketidakmerataan ini memperlebar kesenjangan gizi dan mempertahankan tingkat stunting yang tinggi, yang menunjukkan bahwa kebijakan distribusi perlu ditingkatkan untuk menjangkau semua kelompok masyarakat secara efektif.

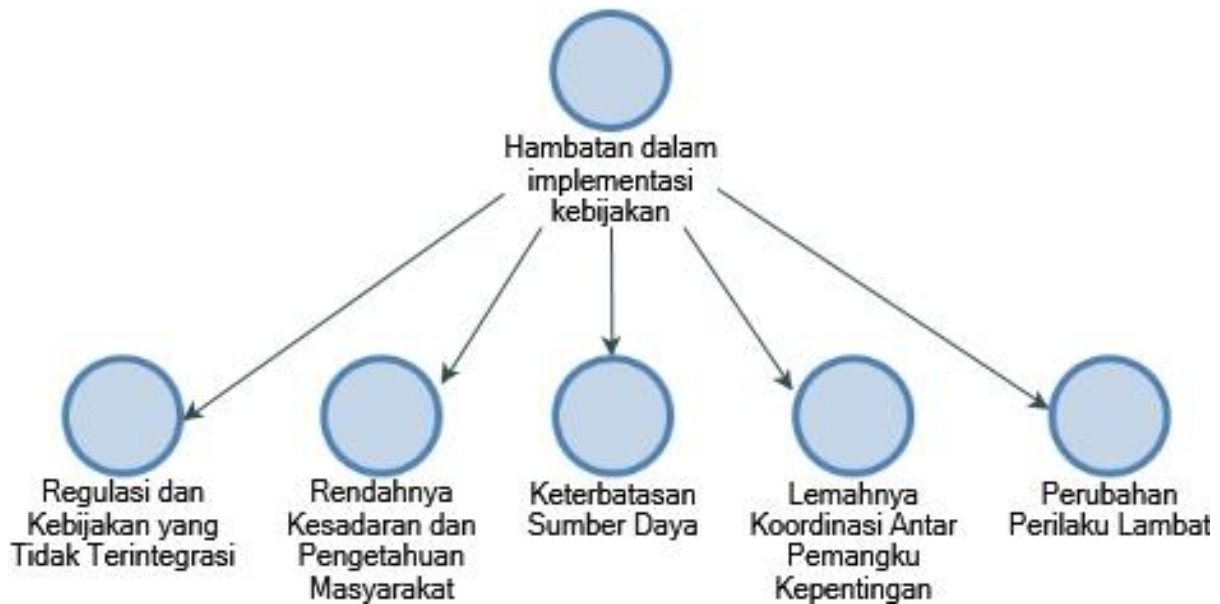
Selain itu, meskipun kampanye edukasi tentang pentingnya makanan bergizi seperti ikan telah meningkatkan pengetahuan masyarakat, perubahan perilaku yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Persepsi masyarakat yang menganggap ikan sebagai makanan kelas dua menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Hal ini menandakan bahwa upaya edukasi perlu diintegrasikan dengan strategi yang lebih mendalam dan kontekstual. Edukasi harus disertai dengan program-program yang mengatasi masalah sosio-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi makanan bergizi, seperti subsidi atau bantuan langsung untuk keluarga kurang mampu, agar lebih banyak keluarga dapat mengadopsi pola makan sehat yang dianjurkan.

Selain kendala distribusi dan perubahan perilaku, evaluasi juga menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat sering kali tidak optimal. Kurangnya sinergi dalam pelaksanaan kebijakan dapat menghambat efektivitas program pencegahan stunting. Pihak-pihak terkait sering kali bekerja dalam silo tanpa adanya komunikasi dan koordinasi yang memadai, yang mengakibatkan duplikasi upaya dan pemborosan sumber daya. Reformasi dalam struktur koordinasi dan pengelolaan program diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak berkontribusi secara terintegrasi dan efektif dalam upaya pencegahan stunting.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek kebijakan, keberhasilan jangka panjang dalam pencegahan stunting di Kota Makassar memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Ini mencakup tidak hanya perbaikan dalam distribusi makanan bergizi dan kampanye edukasi, tetapi juga peningkatan dukungan struktural dan koordinasi. Penyesuaian kebijakan yang berdasarkan data dan analisis yang mendalam, serta pengembangan strategi berbasis komunitas yang lebih inklusif, akan sangat penting dalam mencapai target pengurangan stunting secara efektif dan berkelanjutan. Upaya-upaya ini perlu dilaksanakan dengan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk memastikan dampak yang positif dan berkelanjutan pada kesehatan anak-anak di Kota Makassar.

Identifikasi Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar menghadapi sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya. Identifikasi hambatan ini penting untuk memahami tantangan yang menghambat implementasi kebijakan secara optimal. Dengan memahami masalah-masalah tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan hasil pencegahan stunting. Berikut adalah lima poin utama terkait hambatan dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting di Kota Makassar:



Gambar. 1

Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Sumber: Diolah peneliti dengan Nvivo 12 Plus, 2024

Kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar menghadapi tantangan besar akibat kurangnya integrasi antara regulasi yang diterapkan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan dalam kebijakan dan pendekatan yang diterapkan oleh berbagai pihak sering kali menyebabkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam implementasi. Ketidakjelasan regulasi ini mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan program di lapangan, karena pelaksana kebijakan sering kali menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal yang spesifik. Misalnya, kebijakan pusat yang mengatur pemberian makanan bergizi mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi lokal atau kebutuhan spesifik masyarakat di Kota Makassar. Hal ini dapat mengakibatkan program yang dirancang untuk mengatasi stunting menjadi kurang efektif karena tidak mempertimbangkan konteks lokal atau tidak sesuai dengan kondisi setempat. Koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan dan pelaksana menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Susanti & Mardhiah, 2022).

Lebih jauh, kurangnya kebijakan yang terintegrasi juga dapat mengakibatkan tumpang tindih dalam program dan alokasi sumber daya yang tidak optimal. Misalnya, program kesehatan dan nutrisi yang terpisah tanpa adanya sinergi dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan upaya yang tidak efektif. Penyelarasan dan integrasi antara berbagai kebijakan, baik dalam hal pendanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi, sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang harmonis dan meningkatkan efektivitas pencegahan stunting (Purwanti et al., 2023). Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan reformasi dalam struktur kebijakan yang

mengedepankan integrasi antara regulasi pusat dan daerah. Penyusunan kebijakan yang lebih kohesif, dengan melibatkan berbagai stakeholder dan mempertimbangkan kondisi lokal, akan membantu meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program pencegahan stunting. Dengan adanya kerangka regulasi yang jelas dan terintegrasi, diharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi prevalensi stunting di Kota Makassar.

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang baik merupakan salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kampanye edukasi, hasilnya belum sepenuhnya memadai dalam mengubah perilaku dan persepsi masyarakat. Banyak individu masih kurang memahami betapa pentingnya makanan bergizi seperti ikan dan telur dalam pencegahan stunting, sehingga mereka kurang termotivasi untuk mengikuti program yang ada. Persepsi masyarakat terhadap makanan bergizi sering kali tidak sesuai dengan standar gizi yang sebenarnya. Misalnya, makanan bergizi seperti ikan dianggap sebagai makanan kelas atas atau tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat, terutama di daerah dengan pendapatan rendah. Ketidakhahaman ini menghambat upaya untuk meningkatkan konsumsi makanan bergizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Sebagai akibatnya, anak-anak yang mengalami stunting mungkin tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup meskipun program pencegahan telah dilaksanakan.

Kampanye edukasi yang dilakukan perlu lebih intensif dan disesuaikan dengan konteks lokal agar lebih efektif dalam mengubah persepsi dan kebiasaan makan masyarakat (Aisyah & Pangestika, 2024). Pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi yang baik. Program edukasi juga perlu mengatasi mitos dan kesalahpahaman yang ada, serta memberikan informasi yang jelas tentang manfaat makanan bergizi dan cara-cara praktis untuk mencapainya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan efektivitas kampanye edukasi dan program pencegahan stunting, diperlukan strategi komunikasi yang lebih holistik dan inklusif. Melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin lokal, dan lembaga pendidikan dalam menyebarkan informasi gizi dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang baik, diharapkan partisipasi dalam program pencegahan stunting dapat meningkat, dan dampaknya terhadap penurunan prevalensi stunting di Kota Makassar akan lebih signifikan.

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun fasilitas, merupakan hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar. Anggaran yang terbatas sering kali menghambat kemampuan pemerintah untuk menjalankan program secara menyeluruh dan konsisten. Hal ini berdampak pada kualitas dan kuantitas distribusi makanan bergizi serta penyediaan fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk mendukung pencegahan stunting. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, program-program tersebut sering kali tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana dan menghadapi berbagai kendala operasional. Distribusi makanan bergizi yang tidak merata adalah masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting. Keluarga yang kurang mampu, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang terjangkau, sering kali tidak mendapatkan akses yang sama terhadap bantuan makanan bergizi seperti ikan dan telur. Ketidakterataan distribusi ini menyebabkan ketidakadilan dalam manfaat yang diterima oleh masyarakat, sehingga upaya pencegahan stunting tidak mencapai semua kelompok yang membutuhkan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur distribusi dan logistik juga memperburuk situasi, membuat beberapa daerah sulit dijangkau oleh bantuan yang ada.

Keterbatasan fasilitas kesehatan juga mempengaruhi efektivitas program pencegahan stunting (Firdaus et al., 2024). Fasilitas kesehatan yang kurang memadai, seperti puskesmas dengan peralatan dan tenaga kesehatan yang terbatas, menghambat pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Fasilitas yang tidak lengkap dan tidak mampu menampung kebutuhan pasien dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan, termasuk dalam hal edukasi dan konseling mengenai gizi. Dengan fasilitas yang terbatas, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan

pengetahuan masyarakat tentang pentingnya asupan gizi juga menjadi kurang efektif. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan alokasi anggaran dan investasi yang lebih besar dalam sektor kesehatan, terutama dalam program pencegahan stunting. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur distribusi serta fasilitas kesehatan yang memadai akan sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan. Pendekatan yang lebih strategis dan terkoordinasi dalam distribusi bantuan serta pengembangan kapasitas fasilitas kesehatan dapat membantu memastikan bahwa semua masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat memperoleh manfaat dari program pencegahan stunting secara adil dan efektif.

Koordinasi yang lemah antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar. Tanpa adanya sinergi yang solid, berbagai upaya untuk mengatasi stunting tidak dapat dijalankan secara efektif dan menyeluruh di seluruh wilayah kota. Masalah ini sering kali timbul karena kurangnya komunikasi yang baik antara berbagai pihak, serta adanya tumpang tindih tugas dan tanggung jawab yang menyebabkan ketidakefektifan dalam implementasi program. Koordinasi yang tidak optimal juga mengakibatkan pembagian sumber daya yang tidak merata dan pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten, sehingga mengurangi dampak positif dari program pencegahan stunting.

Meskipun telah dilakukan berbagai usaha edukasi, perubahan perilaku masyarakat terhadap pentingnya asupan gizi yang baik terjadi dengan sangat lambat. Hambatan ini sebagian besar disebabkan oleh faktor budaya dan kebiasaan lama yang sudah mengakar dalam masyarakat. Banyak keluarga masih tidak memahami secara mendalam tentang dampak stunting dan pentingnya gizi yang baik, sehingga mereka tidak mengubah pola makan dan kebiasaan mereka secara signifikan. Kurangnya pemahaman ini memerlukan pendekatan edukasi yang lebih intensif dan berbasis komunitas untuk lebih menyesuaikan dengan konteks lokal dan mengatasi kesenjangan pengetahuan yang ada. Pendekatan edukasi yang selama ini dilakukan sering kali tidak cukup efektif dalam merubah perilaku masyarakat. Banyak kampanye yang kurang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik komunitas yang dituju, sehingga pesan tentang pentingnya gizi tidak sampai dengan jelas. Edukasi yang dilakukan secara umum tanpa mempertimbangkan perbedaan sosial-ekonomi dan budaya di masyarakat dapat mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terpersonalisasi dan melibatkan tokoh masyarakat serta keluarga dalam proses edukasi untuk memastikan pesan yang disampaikan lebih relevan dan berdampak.

Pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang menghambat efektivitasnya. Hambatan utama mencakup kurangnya integrasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, serta koordinasi yang lemah antara berbagai stakeholder. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan reformasi dalam regulasi, pendekatan edukasi yang lebih adaptif, peningkatan alokasi anggaran dan fasilitas, serta perbaikan dalam koordinasi dan distribusi program. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini secara komprehensif, diharapkan pencegahan stunting dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

Untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan pencegahan stunting di Kota Makassar, pengembangan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi sangat penting. Pemerintah Kota Makassar perlu memperkuat koordinasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan merata. Reformasi dalam regulasi, peningkatan alokasi anggaran, serta penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai harus menjadi prioritas utama. Dengan strategi yang lebih terfokus dan sinergis, diharapkan program pencegahan stunting dapat mencapai semua lapisan masyarakat dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam menurunkan prevalensi stunting. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat melalui

kampanye edukasi yang lebih adaptif dan berbasis komunitas akan memainkan peran krusial dalam mendukung kebijakan yang ada. Edukasi yang disesuaikan dengan konteks lokal dan melibatkan tokoh masyarakat dapat membantu mengubah persepsi dan perilaku terkait gizi, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan stunting. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis data, diharapkan Pemerintah Kota Makassar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak-anak, serta mengurangi prevalensi stunting secara efektif.

KESIMPULAN

Temuan utama dari studi ini menunjukkan adanya urgensi yang mendalam untuk meningkatkan efektivitas implementasi program-program terkait. Meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti program pemberian makanan bergizi dan kampanye edukasi, hasil evaluasi menunjukkan bahwa prevalensi stunting masih tinggi di beberapa kecamatan. Terdapat variasi signifikan dalam prevalensi stunting antar kecamatan, dengan kecamatan seperti Bontoala dan Sangkarrang menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Mamajang dan Makassar. Perbedaan ini mencerminkan tantangan dalam distribusi makanan bergizi dan edukasi yang belum merata. Hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan termasuk kurangnya integrasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang baik. Ketidakpastian dalam kebijakan dan perbedaan pendekatan antara berbagai tingkat pemerintahan sering kali menghambat efektivitas program, sehingga beberapa daerah tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari upaya pencegahan stunting. Selain itu, meskipun kampanye edukasi telah diluncurkan, perubahan perilaku masyarakat tidak terjadi secara cepat, sering kali karena persepsi dan kebiasaan yang sudah mengakar.

Keterbatasan sumber daya dan fasilitas juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting. Anggaran yang terbatas menghambat distribusi makanan bergizi yang merata serta penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Distribusi bantuan sering kali tidak menjangkau keluarga yang paling membutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang mampu. Keterbatasan fasilitas kesehatan yang tidak memadai juga mengurangi kualitas pelayanan dan edukasi mengenai gizi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan reformasi kebijakan yang mencakup peningkatan integrasi regulasi, alokasi anggaran yang lebih besar, dan peningkatan fasilitas serta sumber daya. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta harus menjadi prioritas untuk memastikan implementasi yang efektif. Selain itu, edukasi yang lebih adaptif dan berbasis komunitas akan membantu mengubah persepsi dan perilaku masyarakat terkait gizi. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis data, diharapkan kebijakan pencegahan stunting di Kota Makassar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atas dukungan finansial yang diberikan melalui Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun 2024 untuk penelitian ini.

REFERENSI

Aisyah, V. N., & Pangestika, K. A. (2024). Analisis Pesan Persuasif dalam Kampanye Pencegahan Stunting. *CARAKA : Indonesia Journal of Communication*, 5(1), 52–67.

- Aryastami, N. K., Shankar, A., Kusumawardani, N., Besral, B., Jahari, A. B., & Achadi, E. (2017). Low birth weight was the most dominant predictor associated with stunting among children aged 12-23 months in Indonesia. *BMC Nutrition*, 3(1), 40795. <https://doi.org/10.1186/s40795-017-0130-x>
- Astuti, Y., Paek, S. C., Meemon, N., & Marohabutr, T. (2024). Analysis of traditional feeding practices and stunting among children aged 6 to 59 months in Karanganyar District, Central Java Province, Indonesia. *BMC Pediatrics*, 24(1), 12887. <https://doi.org/10.1186/s12887-023-04486-0>
- Atlas, H. E., Brander, R. L., Tickell, K. D., Bunyige, L., Oongo, S., McGrath, C. J., John-Stewart, G. C., Richardson, B. A., Singa, B. O., Denno, D. M., Walson, J. L., & Pavlinac, P. B. (2024). Prevalence and Correlates of Stunting among a High-Risk Population of Kenyan Children Recently Hospitalized for Acute Illnesses. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 110(2), 356–363. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.23-0050>
- Aye, S. K. K., Mar, S. Le, Lwin, N. N., Hnin, Z. L., Hlaing, L. M., Washington, M. L., & Harris, J. R. (2020). Stunting: An overlooked problem in Myanmar-an economic evaluation. *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 36(2), 167–172. <https://doi.org/10.1017/S0266462319003520>
- Bagcchi, S. (2015). India's poor sanitation and hygiene practices are linked to stunting in children, study finds. *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 350, h1564. <https://doi.org/10.1136/bmj.h1564>
- Beatty, A., Borkum, E., Leith, W., Null, C., & Suriastini, W. (2024). A cluster randomized controlled trial of a community-based initiative to reduce stunting in rural Indonesia. *Maternal and Child Nutrition*, 20(1), 13593. <https://doi.org/10.1111/mcn.13593>
- Brar, S., Akseer, N., Sall, M., Conway, K., Diouf, I., Everett, K., Islam, M., Sylmang Sène, P. I., Tasic, H., Wigle, J., & Bhutta, Z. (2020). Drivers of stunting reduction in Senegal: A country case study. *American Journal of Clinical Nutrition*, 112, 860S-874S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa151>
- Conway, K., Akseer, N., Subedi, R. K., Brar, S., Bhattarai, B., Dhungana, R. R., Islam, M., Mainali, A., Pradhan, N., Tasic, H., Thakur, D. N., Wigle, J., Maskey, M., & Bhutta, Z. A. (2020). Drivers of stunting reduction in Nepal: A country case study. *American Journal of Clinical Nutrition*, 112, 844S-859S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa218>
- Corrêa, E. M., Gallo, C. de O., Antunes, J. L. F., & Jaime, P. C. (2023). The tendency of stunting among children under five in the Northern Region of Brazil, according to the Food and Nutrition Surveillance System, 2008-2017. *Jornal de Pediatria*, 99(2), 120–126. <https://doi.org/10.1016/j.jped.2022.07.006>
- Firdaus, Ahmad, S., Akhyar, & Haeril. (2024). Efektivitas, Stunting, Prevalensi, Kabupaten Bima. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(3), 366–376.
- Goudet, S. M., Bogin, B. A., Madise, N. J., & Griffiths, P. L. (2019). Nutritional interventions for preventing stunting in children (Birth to 59 months) living in urban slums in low-and middle-income countries (LMIC). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2019(6), 14651858. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011695.pub2>
- Handryastuti, S., Pusponegoro, H. D., Nurdadi, S., Chandra, A., Pramita, F. A., Soebadi, A., Widjaja, I. R., & Rafli, A. (2022). Comparison of Cognitive Function in Children with Stunting and Children with Undernutrition with Normal Stature. *Journal of Nutrition and Metabolism*, 2022, 9775727. <https://doi.org/10.1155/2022/9775727>
- Has, E. M. M., Krisnana, I., & Efendi, F. (2024). Enhancing Maternal Caregiving Capabilities Model to Prevent Childhood Stunting: A UNICEF-Inspired Model. *SAGE Open Nursing*, 10, 2024. <https://doi.org/10.1177/23779608231226061>
- Hasan, A. M., Dewi, M. K., & Hanifa, F. (2023). Hubungan Peran Petugas Kesehatan, Kualitas Pelayanan, dan Persepsi terhadap Pemanfaatan Pelayanan Penatalaksanaan Stunting pada Balita. *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences*, 2(12), 1031–1038. <https://doi.org/10.53801/oajjhs.v2i12.217>

- Huriah, T., Handayani, P., Sudyasih, T., & Susyanto, B. E. (2021). The determinant factors of stunting among children in urban slums area, Yogyakarta, Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(T4), 1–5. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.5593>
- Kandpal, E., Alderman, H., Friedman, J., Filmer, D., Onishi, J., & Avalos, J. (2016). A conditional cash transfer program in the philippines reduces severe stunting. *Journal of Nutrition*, 146(9), 1793–1800. <https://doi.org/10.3945/jn.116.233684>
- Lallo, R. (2023, December 6). Stunting di Makassar Masih Tinggi. *Fajar.Co.Id*. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/12/06/stunting-di-makassar-masih-tinggi/>
- Machmud, M., Masmuh, A., Nasirin, C., Salahudin, Baharuddin, T., & Musma, A. E. Z. (2020). Artificial Intelligence In The Public Health Sector : The Use Of Telemedicine In Indonesia During Covid-19. *Palarch, Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(7), 10106–10118.
- Muhamad, Z., Mahmudiono, T., Abihail, C. T., Sahila, N., Wangi, M. P., Suyanto, B., & Binti Abdullah, N. A. (2023). Preliminary Study: The Effectiveness of Nutrition Education Intervention Targeting Short-Statured Pregnant Women to Prevent Gestational Stunting. *Nutrients*, 15(19), 15194305. <https://doi.org/10.3390/nu15194305>
- Mutiarasari, D., Miranti, M., Fitriana, Y., Pakaya, D., Sari, P., Bohari, B., Sabir, M., Wahyuni, R. D., Ryzqa, R., & Hadju, V. (2021). A determinant analysis of stunting prevalence on under 5-year-old children to establish stunting management policy. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9, 79–84. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.5622>
- Oktaviani, N., Handayani, D., Wati, H., & Zaki. (2024). Pengaruh Kemiskinan dan Prevalensi Stunting terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6(3), 569–574. <https://doi.org/10.37034/infeb.v6i3.928>
- Permatasari, A., & Walinegoro, B. G. (2023). Collaborative Governance in Realizing Smart Society as a Sustainable Stunting Reduction Effort in Sleman Regency. *E3S Web of Conferences*, 440, 2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344001010>
- Permatasari, T. A. E., Chadirin, Y., Ernirita, Elvira, F., & Putri, B. A. (2023). The association of sociodemographic, nutrition, and sanitation on stunting in children under five in rural area of West Java Province in Indonesia. *Journal of Public Health Research*, 12(3), 2024. <https://doi.org/10.1177/22799036231197169>
- Purwanti, W. D., Hadiwijoyo, S. S., & Purnomo, D. (2023). Strukturasi Peran Bappeda Kota Salatiga dalam Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2021-2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 10.
- Siswati, T., Iskandar, S., Pramestuti, N., Raharjo, J., Rubaya, A. K., & Wiratama, B. S. (2022). Impact of an Integrative Nutrition Package through Home Visit on Maternal and Children Outcome: Finding from Locus Stunting in Yogyakarta, Indonesia. *Nutrients*, 14(16), 14163448. <https://doi.org/10.3390/nu14163448>
- Sumanti, R. (2024). Collaborative Governance: Strategi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 13–26. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.361>
- Susanti, M., & Mardhiah, N. (2022). Strategi Pemerintah Simeulue dalam Penanganan Prevalensi Stunting pada Anak Balita. *Journal of Social and Policy Issues*, 1, 1–6. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.32>
- Unmehopa, A., Palutturi, S., Indar, Arifin, M. A., Thamrin, Y., Stang, & Mallongi, A. (2023). Accessibility of Mother and Child Health Services to Stunting Incidence in Leti Island, Southwest Maluku District. *Pharmacognosy Journal*, 15(5), 856–860. <https://doi.org/10.5530/pj.2023.15.164>
- Utami, A. N. F., Baharuddin, T., Khaerah, N., & Fariaty, C. N. (2022). Public Health Services: Makassar Government's response In the Early Phase of the COVID-19. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 66–76. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v7i1.4884>
- Yahya, D., & Utomo, A. P. (2013, April 6). 3.333 Balita di Makassar Alami Stunting, Dinkes Ungkap Penyebabnya. *Kompas.Com*. <https://makassar.kompas.com/read/2023/04/06/161653178/3333-balita-di-makassar-alami-stunting-dinkes-ungkap-penyebabnya?page=all>

Yu, Y., Xu, F., Shen, H., & Wu, J. (2021). Chronic Candida infection, bronchiectasis, immunoglobulin abnormalities, and stunting: a case report of a natural mutation of STAT1 (c.986C>G) in an adolescent male. *BMC Infectious Diseases*, 21(1), 12879. <https://doi.org/10.1186/s12879-020-05734-9>